

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara berketuhanan yang mana adanya unsur religientitas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹ Hal ini jelas di rumuskan dalam dasar Negara Republik Indonesia yaitu Paancasila, sila ke-1 yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa dan termaktub dalam konstitusi², bahwa Negara berdasar ketuhanan yang maha Esa.³ Hal demikian pastinya juga akan mempengaruhi terhadap setiap peraturan yang terbentuk atau di buat.⁴ Salah satunya adalah peraturan mengenai perkawinan, hal demikian juga sejalan dengan poilitik hukum perkawinan yang mana hukum perkawinan memperhatikan faktor-faktor hukum agama. Unsur ketuhanan sangatlah kuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam). Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹Isrok, Dhia Al Uyun, **Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia** Abstrak), UB Press, Malang. 2012, hlm 69.

²Menurut Krisna Harahap, **Konstitusi Republik Indonesia dari Proklamasi hingga Reformasi**, Grafiti, Jakarta, 2006, hlm1 Menyebutkan konstitusi adalah setiap ketentuan yang terkait dengan keorganisasian Negara yang terdapat dalm undang-undang dasar hingga kebiasaan atau konvensi.

³BAB XI : Tentang AGAMA pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

⁴Taufiqurrohman Syahuri, **Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro-Kontra Pembentukanya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)**, KENCANA, Jakarta, 2015, hlm 91.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Kemudian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghollidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Kedua uraian tersebut menandakan bahwa sebuah ikatan perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan bukan suatu hal yang dapat dengan mudah untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 yang artinya adalah :

“Bergaulah dengan isterimu menurut patutnya, maka jika kamu benci kepadanya, janganlah kamu bersegera menjatuhkan talaknya. Barangkalai kamu membenci pada suatu perkara sedangkan Allah memjadikan kebajikan yang banyak di dalamnya”(QS.AN-NISA:19).⁶

Mengingat sucinya lembaga perkawinan seharusnya perceraian merupakan upaya terakhir yang dapat diambil oleh pasangan suami istri. Perceraian Sebagai suatu peristiwa hukum yang secara faktual banyak terjadi dalam masyarakat tentunya menimbulkan akibat hukum, baik terhadap kedudukan, hak serta kewajiban antara suami dan istri.

Tujuan di keluarkanya Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mengadakan perubahan sosial dan pembinaan perilaku perkawinan dalam masyarakat, yang waktu itu sebelum terbentuknya undang-undang ini cenderung merugikan wanita dan anak-anak,

⁵Pasal1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul Ali*, CV J-ART, 2005, hlm 81

seringnya lembaga perceraian di salah gunakan.⁷ Kajian tentang materi-materi Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di lihat dari beberapa ketentuan hukum yang berkenaan dengan prinsip-prinsip perkawinan sebagaimana yang di sebut dalam penjelsan umum bahwasanya menganut prinsip mempersulit perceraian. Pemberlakuan di keluarkanya Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaanya serta Kompilasi Hukum Islam, merupakan refleksi dari upaya pemenuhan kebutuhan hukum perceraian yang mengatur dan melindungi hak serta kewajiban antara suami dan istri.⁸ Dewasa ini angka perceraian meningkat secara signifikan.

Fenomena semakin tingginya angka bercerai di sertai dengan alasan-alasan perceraian yang beragam pula, namun dewasa ini alasan perceraian yang sering ditemui bersangkutan dengan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis karena alasan perselisihan atau pertengkaran yang terus-menerus. Penulis juga menemukan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga hampir ada di setiap alasan perceraian yang di ajukan ke pengadilan. Terjadinya perceraian lebih di sebabkan adanya perselisihan atau pertengkaran terus-menerus atau dalam hukum islam lebih di kenal denga *syiqaq*. Penjelasan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan

⁷Taufiqurrohman Syahuri, op.cit.hlm 208

⁸ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 63.

Agama (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Agama), *syiqaq* adalah perselisihan tajam dan terus menerus antara suami istri.⁹ Penjelasan mengenai *syiqaq* dalam undang-undang masihlah sangat luas dan kurang spesifik.

Kemudian jika di lihat dari pasal 116 Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat di ajukan dengan alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sebhukan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁰

Jika di lihat lebih lanjut dari peraturan di atas yaitu alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis, alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami atau istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja.¹¹ Selain itu juga bersifat enumeratif, dalam arti penafsiran dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan-alasan hukum perceraian merupakan wewenang

⁹ Aminur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, KENCANA, Jakarta, 2014, hlm 212.

¹⁰ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islama

¹¹ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, op.cit, hlm 211

hakim di pengadilan.¹² Walaupun perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diantara suami dan istri di atur sebagai salah satu dasar pengajuan gugatan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah sangat perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi landasan dari pertengkaran dan perselisihan yang di maksud dalam pasal 116 huruf f tersebut, batasan-batasan mengenai pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus serta pengertian lebih mendalam mengenai kategori perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, agar memenuhi hal tersebut maka sangat perlu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai *syiqaq* karena perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam Kompilasi Hukum Islam tidak bisa terlepas dari hal-hal yang bersangkutan dengan *syiqaq* sebagai dasar hukumnya. Penulis berpendapat aturan yang jelas mengenai hal ini sangatlah perlu guna melindungi para pihak serta menempatkan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bukan menjadi pasal yang sangat alternatif sehingga menghilangkan tujuan semula mengapa pasal tersebut di bentuk. Sifat kealternatifan pasal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan perceraian diantaranya putusan Mahkamah Syariah Lhoksukson Nomor 0431/pdt.G/2014/MS-Lsk, Putusan Pengadilan Agama Malang nomor 0964/Pdt.G/2013/PA.Mlg, Putusan Pengadilan Agama Karangasem nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Kras, dan putusan Pengadilan Agama Kebumen nomor 1990/Pdt.G/2012/PA.Kbm. Dasar pertimbangan hakim dari keempat putusan tersebut hampir sama yaitu bahwa suami dan istri tidak mungkin

¹² Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, loc.cit.

untuk melanjutkan pernikahan mereka karena faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang menyebabkan goyahnya rumah tangga.

Persamaan dasar pertimbangan hakim untuk memutus perceraian dalam empat putusan tersebut tidak di ikuti dengan kesamaan dari pokok perkara dari keempat gugatan yang di ajukan. Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukson Nomor 0431/pdt.G/2014/MS-Lsk menjelaskan pokok perkaranya bahwa penggugat (istri) di jatuhkan talak tiga oleh penggugat (tergugat) karena anggapan bahwa tergugat sudah tidak perawan sebelum menjadi istri dari tergugat, padahal penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan suami istri, tergugat telah meninggalkan penggugat selama tujuh bulan karena alasan tersebut, sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai. Pokok perkara dari putusan nomor 0964/Pdt. G/2013/PA.Mlg adalah bahwa penggugat (istri) merasa Tergugat (suami) kurang menghormati orang tua penggugat, tergugat menurut penggugat juga sering cemburu buta dan menuduh penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti, selain itu tergugat juga mengekang penggugat dalam bergaul. Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama tiga bulan namun di antara mereka masih berkomunikasi dan penggugat juga masih memberikan nafkah lahir. Pokok alasan tersebut yang menjadi dasar penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian. Pokok perkara dari putusan nomor nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Kras adalah rumah tangga antara penggugat (istri) dan tergugat (suami) sudah tidak harmonis lagi dan muncul perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan bahwa penggugat merasa nafkah yang di berikan tergugat tidak cukup, alasan lain adalah sekali waktu pada saat penggugat membangunkan

tergugat untuk sholat subuh tergugat marah dan menendang penggugat. Putusan Nomor 1990/Pdt.G/2012/PA.Kbm pokok perkaranya adalah bahwa rumah tangga antara penggugat (istri) dan tergugat (suami) sudah tidak harmonis dan muncul perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena masalah awal yaitu tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada penggugat sehingga menyebabkan antara penggugat dan tergugat pisah kamar selanjutnya puncak perselisihan bahwa tergugat dan penggugat pisah rumah kurang lebih selama tiga bulan.

Penulis berpendapat jika makna *syiqaq* tidak di jelaskan dengan lebih spesifik maka akan membuat pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut malah menjadi batu loncatan bagi salah satu pasangan suami atau istri untuk menceraikan pasangannya sehingga bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Menurut penulis point dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ini cakupannya sangatlah luas hakim harus lebih bijaksana dan penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan cerai. Hakim juga harus dapat melihat dengan cermat dan teliti dari segala faktor yang menjadi landasan pasangan suami istri tersebut bercerai, hal tersebut dapat tercapai apabila makna dari *syiqaq* di jelaskan lebih konkrit sehingga para hakim tidak multitafsir dalam memaknai pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan alasan-alasan hukum perceraian sebagaimana di tentukan dalam dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dapat di tegaskan bahwa selain harus di lakukan di depan sidang pengadilan¹³ guna mewujudkan kepastian hukum yang

¹³ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang

adil dan melindungi istri bahkan suami selama dan setelah proses hukum perceraian, perceraian juga tidak di larang dalam arti suami dan istri boleh memutuskan hubungan perkawinan di antara keduanya, dengan alasan-alasan hukum yang sudah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Hukum perceraian secara prinsip memperbolehkan perceraian, namun mempersukar proses hukum percerainya, sehingga perkawinan tidak hanya mengandung unsur lahiriah atau jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah aatau rohaniyah.¹⁵

B. Orisinalitas Rumusan

Terdapat penelitian mengenai tema yang sama yaitu tentang perceraian, berikut tabelnya :

TABEL 1

ORISINALITAS PENELITIAN

PENULIS	JUDUL	T A H U N	RUMUSAN MASALAH	PERBEDAAN
Fitri Hidayat,S.H., M.H	REKONTRUKSI ALASAN PERCERAIAN PADA PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH	2 0 1 6	Bagaimana rekontruksi alasan perceraian pada pasal 19 huruf f Peraturan	Penulis ingin meneliti makna dari <i>syiqaq</i> yang berhubungan dengan alasan perceraian

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian menurut pasal 115 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

¹⁴ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, op.cit.hlm 212.

¹⁵ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, Loc.cit.

	NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN		ran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pe- laksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Per- kawina ?	karena perselisihan dan pertengkaran se- cara terus-menerus da- lam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Is- lam, yang mana da- lam penelitian sebe- lumnya belum mem- bahas mengenai per- selisihan dan perteng- karan yang termuat dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
--	--	--	---	---

Suber data.data sekunder.diolah,2017

C. Rumusan Masalah

Apa Batasan Perselisihan dan Pertengkaran Secara Terus Menerus Sebagai Alasan
Perceraian Dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam?

D. Tujuan Penulisan

Merumuskan tentang batasan dalam pasal116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di
tinjau dari *syiqaq* sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam.

E. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini baik secara teoritis maupun secara
praktis adalah sebagai berikut :

1.Manfaat Teoritis

Sebagai masukan bermanfaat di dalam perkembangan ilmu hukum perdata, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum keluarga terkait dengan perceraian.

2.Manfaat Praktis

a.Bagi Masyarakat

1) Secara Umum

Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, agar terjamin hak-hak nya dalam suatu ikatan perkawinan, serta tidak ada pihak yang dirugikan dalam sebuah ikatan perkawinan.

2) Secara khusus

Khusus bagi Suami atau istri yang di ceraikan pasanganya dengan alasan yang tertuang dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sebagai bahan pertimbangan yang dapat membantu para pihak untuk menjaga haknya dalam sebuah perkawinan.

b.Bagi Hakim

Dapat di jadikan pertimbangan hukum oleh hakim untuk memutus perkara yang berkaitan dengan alasan yang terdapat dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang di gunakan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri diluar syarat perceraian.

c. Bagi Mahasiswa

Dapat dijadikan referensi dalam penelitian yang bersangkutan dan dapat digunakan dalam memahami batasan mengenai pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dapat digunakan .

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, orisinalitas rumusan, tujuan penelitan dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat teori-teori dan tinjauan umum yang berhubungan dengan batasan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat jenis penelitian, jenis pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik dan analisis bahan hukum, serta teknik penelusuran bahan hukum

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini memuat hasil penelitian dari batasan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan hasil penelitian yang telah di jabarkan pada bab sebelumnya.